

# Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang Vote Buying Hijab dalam Pemilukada Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan

Nova Setya Anggraeni<sup>1\*</sup> dan Agus Machfud Fauzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH- Unesa

[nova.19100@mhs.unesa.ac.id](mailto:nova.19100@mhs.unesa.ac.id)

## Abstract

*Political practice is an action taken to gain victory in the struggle for power. The practice of money politics is still a scourge in Indonesia. In the 2020 post-conflict local election in Lamongan Regency, especially in Sidogembul Village, there is a practice of money politics in the form of money, goods and hijab. The aim of this research is to identify community construction, the factors behind the practice of money politics and hijab and identify data findings as well as its relation to relevant sociological theory. This research is analyzed using Peter L. Berger's theory of social construction. In this study using a qualitative approach and methods. Collection techniques by conducting in-depth interviews, documentation, and observing events in the field. The results of the study show that there are three constructions of community categories regarding political practices in the 2020 post-conflict local elections in Lamongan Regency. Namely, first, the public considers the practice of money politics to be an act that has become a tradition, second, the community believes that the practice of money politics should be dealt with immediately and given sanctions, third, the community does not care whether or not the practice of money politics exists. The practice of money politics has become a tradition because of the underlying factors, namely external factors, external factors originating from family, friendships to work agreements. External factors have a fairly high influence and will continue to occur if individuals do not have a high opinion of their choices.*

## Abstrak

*Praktek politik merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Praktek politik uang sampai saat ini masih menjadi momok di Indonesia. Pada pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Sidogembul adanya praktek politik uang yang berupa uang, barang dan hijab. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi konstruksi masyarakat, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik politik uang dan hijab dan mengidentifikasi temuan-temuan data serta keterkaitannya dengan teori sosiologi yang relevan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode. Teknik pengumpulan dengan melakukan wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi kejadian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga konstruksi kategori masyarakat tentang praktek politik pada pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan. Yaitu pertama masyarakat menganggap praktek politik uang merupakan tindakan yang sudah menjadi tradisi, kedua masyarakat menganggap praktek politik uang seharusnya segera diatasi dan diberikan sanksi, ketiga masyarakat tidak peduli baik ada atau tidaknya praktek politik uang. Praktek politik uang menjadi tradisi karena adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi yaitu seperti adanya faktor eksternal, faktor eksternal berasal dari keluarga, pertemanan hingga kesepakatan kerja. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup tinggi dan akan terus terjadi jika individu tidak memiliki pendirian yang tinggi akan pilihannya.*

*Keywords: Tradition; Money Politic; Community Construction Peter L. Berger.*

*Tradisi; Politik Uang ; Konstruksi Masyarakat Peter L. Berger.*

## 1. Pendahuluan (500-750 kata)

Politik uang merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Politik uang tidak hanya berbentuk uang tetapi juga dapat berupa barang, sembako dan fasilitas umum. Belum ada penjelasan yang tetap mengenai politik uang dalam Undang-Undang pemilu dan pilkada. Pada proses pemilu berlangsung sangat dibutuhkan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Sayangnya dalam praktiknya masih terjadi kecurangan atau tindakan yang tidak pantas salah satunya fenomena “

Politik Uang” padahal terdapat lembaga yang telah mengawasi pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran (Nabilah et al., 2022)

Politik uang dapat terjadi pada seluruh tingkat pemilihan dari pemilihan presiden hingga pemilihan kepala desa. Sama halnya yang terjadi pada pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Sidogembul. Yang mana semua kandidat melakukan praktek politik uang. Terdapat tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, diantaranya pada nomor urut 1 yaitu pasangan Suhandoto- Astiti Suwarni yang memiliki jargon “kompak” merupakan kandidat independen, pada nomor urut 2 terdapat pasangan Yuhronur Efendi- Abdul Rouf yang memiliki jargon “YES bro” merupakan pasangan yang diusung oleh 7 partai yaitu Demokrat, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Perindo dan Hanura dan yang ketiga yaitu pasangan Kartika Hidayati- Saim yang diusung oleh PKB dan PDIP. pada pukul 16.15, di wilayah Kabupaten Lamongan menunjukkan pasangan calon bupati nomor urut 01 Suhandoyo- Astiti Suwarni mendapatkan 266.738 suara atau 37,8 persen, 02 Yuhronur Efendi- Abdul Rouf unggul 42,5 persen atau 300.312 suara dan pasangan calon 3 Kartika Hidayati- Sa’im mendapatkan 139.131 suara atau 19,7 persen (Bisnis.com pada rekapitulasi formulir C di situs KPU, Rabu (16/12/2020)

Dalam teori Robert A. Dahl membahas tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berfokus pada aspek kebebasan politik. terdapat tujuh prinsip dalam sistem demokrasi yang harus ada yaitu antara lain : *Pertama*, adanya kontrol atas keputusan pemerintah. *Kedua*, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. *Ketiga*, adanya hak memilih dan dipilih untuk orang dewasa terutama yang sudah memiliki KTP. *Keempat*, adanya hak bagi orang dewasa untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum di pemerintahan. *Kelima* adanya kebebasan untuk memberikan pendapat tanpa adanya ancaman dari pihak manapun, *keenam* adanya kebebasan individu atau warga negara untuk mencari sumber informasi terpercaya. *Ketujuh* warga negara memiliki hak untuk membangun dan membantuk lembaga atau organisasi independen.

Pada ketiga pasangan tersebut memiliki strateginya masing-masing untuk mendapatkan suara dari masyarakat Lamongan. Salah satunya dengan melakukan tindakan politik uang. Tidak hanya memberikan uang saja, tetapi ketiga pasangan calon memberikan beberapa fasilitas atau barang untuk masyarakat warga Lamongan. Seperti pemberian bantuan sembako, uang, fasilitas untuk keolahragaan, failitas umum, batik dan hijab. Pada praktiknya, para kandidat atau calon memiliki tim sukses yang berasal dari desa kemudian menyebar di semua dusun di Desa Sidogembul yaitu Dusun Talun, Dusun Pagak, Dusun Kepoh dan Dusun Butoh Rejo. Selama pemilu berlangsung tim sukses melakukan aksinya untuk memilih kandidat yang mereka usung. Tim sukses melakukan aksinya dengan mengajak masyarakat ngopi atau *cangkeruk* hingga perkumpulan lainnya yang membahas mengenai keunggulan dan *feedback* yang akan diterima oleh masyarakat jika menggunakan hak suaranya untuk kandidat yang mereka usung terlebih jika memenangkan pemilihan Bupati.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agilia Gunawan. turut membahas terkait praktek money politics dalam pemilihan legislatif tahun 2019 ( studi kasus kelurahan pamulang barat kecamatan pamulang. Di dalam penelitian ini dijelaskan tentang praktik money politic yang terjadi di Pamulang Barat dengan cara memberikan uang, fasilitas umum yang diberikan oleh tim sukses, caleg dan anggota partai politik. Kemudian adanya faktor ekonomi, kebudayaan dan kesepakatan kerja yang menjadikan masyarakat Pamulang Barat menerima praktek money politic. Sedangkan respon masyarakat mengenai praktek money politic ini yaitu masyarakat tidak setuju, karena merupakan tindakan yang memiliki pengaruh negatif, karena ketika kandidat memenangkan pemilihan legislatif maka yang akan dipikirkan

adalah bagaimana cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama pencalonan atau pemilu berlangsung (Gunawan, n.d.)

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang adanya money politik yang berupa pemberian hibah, uang dan barang lainnya. Oleh karenanya, peneliti merancang penelitian ini dengan mengangkat **judul “ Kontruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang vote buying hibah dalam Pemilukada Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan”** Tujuan dari artikel ini adalah untuk Mengidentifikasi konstruksi masyarakat tentang praktik politik uang vote buying hibah dalam Pemilukada bupati tahun 2020 di Kabupaten Lamongan.

## 2. Kajian Pustaka (bersifat fakultatif, minimal 500 kata)

### 2.1 Money Politic

Menurut ismawan (1999) Politik uang merupakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan pemberian imbalan tertentu. menurut M.Abdul Kholiq dalam Gustia (2015: 28) merupakan tindakan yang membagi-bagikan uang atau materi barang lainnya, yang dimiliki oleh politisi yang mengikuti pemilu atau dari partai yang ikut menjadi pengusung dari kandidat. Sehingga politik uang adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh calon pemilu atau para kandidat untuk mempengaruhi masyarakat dengan memberikan imbalan pada proses politik berlangsung. Terdapat tiga dimensi kategori politik uang menurut Bumke, yaitu vote buying, vote broker dan korupsi politik. Vote buying merupakan tindakan money politic yang menukarkan barang, jasa dan uang dengan suara pada saat pemilu. Vote broker merupakan orang yang mewakili kandidat atau partai untuk membeli suara. (Fitriani et al., 2019)

#### a. Bentuk bentuk money politic

##### 1) Berbentuk Uang

Uang merupakan salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, untuk mengendalikan wacana strategis yang berhubungan dengan kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Uang dapat menjadi modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan, dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak.

##### 2) Berbentuk Fasilitas umum

fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. (MASDAR, 2020)

#### b. Strategi Money Politic

##### 1) Serangan fajar

Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Jayus et al., n.d.)

##### 2) Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa kegiatan ini biasa terjadi ketika kampanye dan melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. (Jayus et al., n.d.)

c. Faktor Penyebab terjadinya Politik Uang

1) Faktor Keterbatasan Ekonomi

Adanya praktek politik uang ini dapat terjadi karena keterbatasan ekonomi yang mana dapat memunculkan masalah-masalah baru salah satunya membuka jalan terjadinya praktek politik uang atau money politic. Hal tersebut dapat diartikan jika kemiskinan menjadikan masyarakat memiliki cara pandang yang rasional untuk mendapatkan suatu keuntungan, termasuk menerima uang dari kegiatan pemilihan umum.

2) Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan berpengaruh pada banyaknya pengetahuan yang mereka dapat. Tidak semua orang tahu mengenai apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang akan ditimbulkan dari politik. disebabkan karena kurangnya atau bahkan tidak ada pembelajaran terkait politik di sekolah-sekolah atau masyarakat sendiri yang menganggap jika politik merupakan suatu hal yang tidak penting atau acuh terhadap perkembangan politik di Indonesia.

3) Faktor Lemahnya Pengawasan

Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktek politik uang itu sendiri,

d. Dampak Terjadinya Politik Uang

Dampak yang diberikan dari adanya politik uang ini dapat menjadi dampak jangka panjang, karena jika politik uang terus dibiarkan pada saat adanya pemilihan umum, maka hal tersebut akan merugikan semua orang. Adanya praktek politik uang ini juga dapat menimbulkan permasalahan baru karena dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. (Fitriani et al., 2019)

## 2.2 Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Konstruksi sosial adalah teori sosiologi kontemporer yang dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Pada teori ini memiliki fokus paradigma yaitu pola dari interaksi antara individu satu dengan yang lainnya, yang mana pada tahapannya (Mufarrochah, 2020).

Teori ini digunakan untuk mendapatkan informasi nyata yang terjadi pada masyarakat. Menurut Berger pada lingkungan atau kehidupan masyarakat terdapat realitas yang berkembang, realitas yang sebenarnya merupakan realitas yang sangat penting tetapi masyarakat mengabaikan, karena realitas ini memiliki pola atau aturan yang teratur sehingga dapat langsung diterima oleh masyarakat tanpa adanya permasalahan. (Fahmi, 2020)

Terdapat tiga tahapan pada teori konstruksi ini yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses penyesuaian dari setiap atau seorang individu kedalam dunia secara terus- menerus baik aktivitas fisik maupun mentalnya Obyektivasi merupakan hasil dari kegiatan eksternalisasi manusia. Yang dijelaskan lebih lanjut obyektivasi adalah pencapaian produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi kemudian mendapatkan sifat yang objektif. Internalisasi merupakan proses dari peresapan kembali realitas sosial yang dilakukan oleh manusia dan

mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Berger menyatakan jika proses merupakan suatu konstruksi sosial masyarakat dalam sejarah perjalanan panjang di masa silam hingga masa kini, dan masa yang akan datang. Berger juga berupaya untuk memadukan banyak perspektif dari berbagai mazhab dan teori sosiologi, dengan lebih memuaskannya pada satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya, sehingga menjadi satu konstruksi teoritis yang dapat memadai. Kemudian, penjelasan yang dihasilkan dapat menunjukkan hakikat masyarakat yang memiliki corak pluralitas, dinamis dan kompleks

Dari pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckman inilah peranan sosiologi pengetahuan yang sebelumnya dipandang sebagai sejarah pemikiran intelektual yang memperoleh posisinya yang baru, dan tampil sebagai instrument penting dalam menemukan hakikat masyarakat ke depan secara jelas. Asumsi utama dari teori konstruksi masyarakat Peter L. Berger mengatakan jika realitas dan pengetahuan diciptakan oleh manusia kreatif, sehingga apa yang ditemukan realitas di dunia ini menurut teori ini adalah hasil dari konstruksi manusia. Jadi, realitas itu bersifat konstruksi atau berbanding terbalik dengan sifat natural, maka bisa dikatakan jika realitas itu tidak dibentuk secara alamiah. Sehingga teori ini sangat relevan dengan penelitian ini karena realitas dan pengetahuan dibentuk dari konstruksi masyarakat. Yang mana, masyarakat memiliki konstruksinya masing-masing tentang politik uang dan hijab dalam pemilu pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan.

### **3. Metode Penelitian (minimal 250 kata)**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif Menurut Koentjaraningrat merupakan penelitian yang memiliki 3 format desain yang meliputi penelitian deskriptif, Verifikasi dan format Grounded research. (Salmaa, 2021). Pada penelitian ini peneliti ingin melihat lebih dalam mengenai konstruksi masyarakat tentang praktik money politic dan hijab dalam pemilu pada Lokasi penelitian yang diambil peneliti dalam penelitian ini berada di Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Kriteria subjek penelitian ini yaitu: 1) Warga asli Desa Sidogembul, 2) Laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki KTP (kartu tanda penduduk), 3) Status Sosial: Ekonomi kelas atas, menengah dan bawah, 4) Latar Belakang Organisasi yang di anut Masyarakat Sidogembul.

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Terdapat 3 tahapan untuk menganalisis data berdasarkan Miles dan Huberman diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. (Salmaa, 2021)

### **4. Hasil dan Pembahasan (minimal 2.500 kata)**

Seluruh subjektif dalam penelitian ini menjelaskan kondisi berdasarkan yang dialami. Kondisi objektif masyarakat sendiri kondisi yang dialami oleh masyarakat ketika adanya pemilu. Masyarakat memiliki hak suara yang dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin pada calon kandidat, satu suara dari masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar, meskipun hanya selisih satu suara, maka dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan memenangkan pemilihan tersebut. Tidak sedikit masyarakat menentukan pilihannya atas dasar dari imbalan yang mereka terima dari para kandidat. Masyarakat juga terkadang memilih untuk golput meskipun telah menerima imbalan, dengan alasan tidak ada yang bisa mereka pilih.

Kondisi objektif masyarakat dapat dikaitkan dengan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Pada kondisi objektif ini dipengaruhi oleh kepribadian dan lingkungan

sekitar. Tingkat pendidikan, pengetahuan dan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dinilai masih tergolong rendah, adapun terdapat masyarakat yang menuntaskan pendidikan terakhirnya di perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari temuan data peneliti bahwa berdasarkan pendidikan masyarakat di lokasi penelitian pada awalnya berpendidikan lulus dari sekolah SMA. Namun sebagian ada lulusan dari SD dan perguruan tinggi.

Masyarakat di lokasi penelitian memiliki perspektif yang berbeda mengenai adanya praktek politik uang pada saat pemilukada tahun 2019 di Kabupaten Lamongan. Perbedaan tersebut ditunjang dengan tingkat ekonomi, pendidikan dan pekerjaan masyarakat. Terdapat 3 kategori yang didapat pada pembahasan mengenai adanya praktek politik uang. Yang pertama yaitu masyarakat menolak adanya praktek politik uang, yang kedua masyarakat menerima dan menganggap sah adanya praktek politik uang dan yang ketiga masyarakat acuh terhadap baik ada atau tidaknya praktek politik uang ketika pemilukada berlangsung. Pekerjaan yang dimiliki oleh subjek penelitian adalah bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, guru, buruh tani, pemerintahan desa, teknisi dan perawat. Adapun perbedaan yang dimiliki, tidak menjadi jaminan subjek penelitian yang memiliki ekonomi, pendidikan dan pekerjaan yang bagus menolak adanya praktek politik uang. Seperti halnya Mbak Yolanda yang menganggap jika tidak menerima maka merasa rugi dan menurutnya yang menerima lebih banyak dari masyarakat biasa adalah orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan yang lebih tinggi juga.

Masyarakat di lokasi penelitian ditemukan kurang memahami tentang bahaya atau dampak dari praktek politik uang. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pendampingan dari pihak pemerintahan, terlebih yang menangani khusus terkait masalah pemilihan umum yaitu BAWASLU. Ketidaktahuan masyarakat terkait politik uang juga menyebabkan praktek politik uang terus terjadi. Masyarakat pada lokasi penelitian menganggap jika hal tersebut sangat lumrah dan dianggap sebagai rejeki. Masyarakat juga telah menjadikan acuan pemberian terbanyak lah yang akan mendapatkan hak suara, tetapi terdapat masyarakat yang meskipun telah mendapatkan imbalan namun tetap memilih untuk golput dengan alasan kandidat tidak ada yang sesuai dengan kriterianya. Hal tersebut menjadikan generasi muda menganggap jika praktek politik uang memang benar-benar harus ikut andil dalam pemiluan umum, dan merupakan suatu tradisi yang harus dilestarikan. Pada makna objektif konstruksi masyarakat terkait adanya praktek politik uang dan hijab pada pemilukada di Kabupaten Lamongan lebih tepatnya di Desa Sidogembul adalah berdasarkan pandangan Islam, politik uang (riswah) hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah SWT.

Pada realitas sosial sebagai suatu hal yang tersirat pada pergaulan sosial dengan disertai komunikasi dalam Bahasa. Realitas sosial berawal dari pengalaman intersubjektif. Pengetahuan terkait realitas sosial dapat berhubungan dengan suatu kehidupan dari masyarakat yang disertai seluruh aspeknya. Dalam penelitian yang berkaitan dengan intersubjektif, Peter L. Berger memahami paradigma dari Weber tentang subjektivitas dan paradigma Durkheim tentang objektivitas. Dalam hal ini Weber mampu menempatkan dalam subjektivitas dengan berada di atas objektivitas.

Realitas subjektif sendiri suatu realitas yang berasal dari diri khalayak yang berawal dari realitas simbolik dan objektif. Realitas subjektif yang terjadi dengan didasarkan pendapat pribadi dari seseorang. Pada realitas subjektif yakni seseorang individu ada di kehidupan masyarakat dapat sebagai suatu bagian yang tergolong sulit dipisahkan. Individu adalah suatu pembentuk dari masyarakat dan masyarakat sebagai pembentuk dari para individu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa realitas subjektif adalah suatu realitas yang ada pada diri manusia.

Berdasarkan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman terkait realitas subjektif yaitu suatu realitas yang berdasarkan persepsi. Realitas dapat muncul dengan berasal dari suatu tindakan yang memersepsi dengan disertai faktor. Realitas subjektif telah bergantung dengan sebuah kejadian nyata, namun berpisah dengan objektif. Pada realitas subjektif dinilai hanya bergantung dengan pengalaman dan ingatan. Pada realitas tergolong hanya mampu dipastikan dengan setidaknya hingga batas secara tertentu. Realitas subjektif ini sesuai dari kondisi dari masyarakat dengan mampu diterima oleh para individu yang disertai pendapat secara pribadi. Hal ini sesuai dengan realitas subjektif Konstruksi masyarakat terhadap adanya praktek politik uang dan hijab di Desa Sidogembul pada pemilukada.

Pada realitas subjektif dapat melalui sebuah konstruksi dengan internalisasi. Internalisasi adalah suatu pemahaman yang dimiliki oleh setiap individu yang kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dengan demikian, dari sepuluh informan sebagai subjek penelitian dengan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konstruksi masyarakat terhadap adanya praktek politik uang dan hijab di Desa Sidogembul pada pemilukada tahun 2020. Yang mana terdapat tiga kategori yang berbeda dalam menyikapi adanya praktek politik uang dan hijab. Khususnya empat orang informan yang menganggap praktek politik merupakan sebuah hal yang lumrah, empat orang informan menganggap praktek politik merupakan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan dan diterima, dua orang informan menganggap jika ada atau tidaknya praktek politik uang pada saat pemilukada tidak memiliki dampak apapun. Pemahaman ini dapat muncul karena adanya suatu proses internalisasi dengan melihat peristiwa objektif yaitu informan yang memiliki pendidikan dan ekonomi yang tinggi cenderung untuk menolak dan tidak peduli dengan adanya praktek politik uang. Sedangkan informan yang berada pada tingkat ekonomi dan pendidikan yang kurang cenderung menerima dan memaklumi adanya praktek politik uang. Berikut adalah analisis realitas subjektif konstruksi masyarakat terkait adanya praktek politik uang pada saat pemilukada di Desa Sidogembul tahun 2020.

Seluruh subjek pada penelitian kali ini, sebenarnya sudah sadar jika praktek politik uang sendiri merupakan tindakan yang tidak baik, tetapi hal tersebut menjadi tuntutan karena merasa canggung, tidak enak dan kebutuhan. Berikut penjelasan rangkuman dari subjek penelitian terkait konstruksi tentang adanya praktek politik uang dan hijab pada pemilukada tahun 2020.

Subjek Mbak Yolanda merupakan informan yang menganggap jika adanya praktek politik uang dan hijab adalah suatu hal yang tidak memiliki dampak apapun terhadap dirinya dan kehidupannya. Tetapi, beliau sadar dengan dampak-dampak yang akan terjadi ketika praktek politik uang tersebut terus terjadi. Mbak Yolanda menjelaskan jika adanya hijab mungkin dijadikan sebagai pancingan untuk kaum perempuan, karena agar dinilai seperti agamis oleh pemilik hak suara, dan dianggap sah-sah saja.

Subjek Ibu Riska, merupakan ibu rumah tangga sekaligus merangkap sebagai guru ngaji dan guru MI di Desa Sidogembul dan Desa Surabayan. Menurut beliau politik uang sangatlah merugikan baik bagi penerima maupun pemberi. Karena ketika kandidat mendapatkan hak suara yang sunggul dan terpilih menjadi pemimpin maka banyak kemungkinan mereka akan berfokus pada bagaimana cara mengembalikan modal tersebut. Tetapi, pada kenyataannya masyarakat khususnya warga desa sidogembul menganggap jika hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa ketika adanya pemilihan umum. Pada wawancara lanjutan ibu Riska menjelaskan jika, seharusnya tidak menggunakan hijab jika ingin mengikat perhatian kaum perempuan, karena ditakutkan hijab sendiri dianggap sebagai suatu yang sakral oleh umat Islam, sedangkan tindakan praktek politik

uang sendiri merupakan tindakan yang haram hukumnya, maka sebaiknya diganti dengan barang lainnya yang mungkin memiliki nilai tinggi daripada hijab.

Subjek Mbak Tika, yang memiliki kesibukan sebagai perawat. Menurutnya adanya praktek politik uang dan hijab dianggap suatu yang memang biasa terjadi tetapi tidak dengan hijab. Karena, menurutnya hal tersebut bisa diganti dengan barang lain yang lebih masuk akal, ditambah hijab sendiri hanya diberikan pada kaum perempuan saja. Terlepas dari hal tersebut tindakan praktek politik uang sendiri sudah tidak boleh dilakukan ditambah dengan adanya pembagian hijab sehingga seperti tidak menghargai hijab yang dianggap baik oleh kaum muslim terlebih perempuan.

Realitas objektif, realitas simbolik, dan realitas subjektif yang ada di lingkup masyarakat Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi. Di dalam hal ini sebagaimana perspektif Berger dan Luckman, objektivitas akan terjadi saat ada penegasan berulang dari individu satu ke individu lainnya, dengan subjektivitas yang sama. Proses yang menghasilkan realitas sosial inilah yang disebut Berger dan Luckman sebagai konstruksi yang terdiri dari eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi Pada analisis yang di dapat dari penelitian ini yaitu pemilihan umum yang terjadi di masyarakat Desa Sidogembul. Pada dasarnya asal usul dari adanya praktek uang berasal dari pengalaman sebelumnya. Yang mana hal tersebut tidak segera ditangani baik masyarakat itu sendiri dan pemerintahan. menyebabkan sampai saat ini praktek politik uang masih terjadi pada pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Sidogembul. Konstruksi praktek politik uang sendiri dibangun dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Sidogembul. Informan menjelaskan jika hal ini juga berdasarkan dari pengalaman eksternal dari keluarga dan teman, yang mana mereka melihat bagaimana cara kerja praktek politik uang sehingga tim sukses mendapatkan hak suara dari masyarakat yang akan diberikan imbalan tersebut. Pada pemilihan kandidat, informan tidak berdasarkan pada pilihannya dirinya sendiri melainkan adanya faktor eksternal yang mengharuskan informan tersebut untuk memilih kandidat yang akan dipilih sesuai dengan perintah yang didapatkan. Sehingga dari hasil penelitian data tersebut memiliki 3 kategori dalam mengkonstruksikan adanya praktek politik uang dan hijab dalam pemilukada tahun 2020. Objektivitasi penelitian ini adalah latar belakang dari pemilihan kandidat yang akan dipilih oleh informan. Hal tersebut terjadi karena sebelum memilih kandidat, informan diberikan informasi atau arahan baik dari keluarga, teman dan pemerintahan. Faktor tersebut tidak mudah untuk dihindari karena memiliki berhubungan dengan keluarga, teman dan kesepakatan kerja. Hal tersebut menjadikan informan tidak dapat leluasa untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dari dirinya masing-masing. Karena mementingkan silaturrhumi agar terjaga dengan baik.

Internalisasi pada tahapan ini informan masyarakat Desa Sidogembul tetap memilih kandidat sesuai dengan arahan yang telah di instruksikan, karena adanya faktor dari keluarga, teman dan pemerintahan. Pada ke sepuluh informan tersebut sebagian menerima adanya praktek politik uang karena dianggap sebagai suatu hal yang biasa atau tradisi di Desa Sidogembul ketika adanya pemilihan umum. Sebagian informan memilih untuk menolak adanya praktek politik uang karena dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik. Informan selanjutnya tidak peduli dengan ada atau tidaknya praktek politik uang, karena tidak memiliki dampak atau pengaruh langsung dalam hidupnya. Seluruh informan sadar jika menerima imbalan atau pemberian dari kandidat ketika adanya kampanye merupakan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan tetapi adanya tekanan atau suatu keharusan yang menyebabkan informan menerima karena faktor dari keluarga, teman, pemerintah dan hubungan pekerjaan. Sedangkan pada

konstruksi mengenai adanya pembagian hijab. Informan menjelaskan jika hijab merupakan suatu beda yang suci dan dihargai maka seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suara, karena pada dasarnya praktek politik uang dalam dunia politik dan

### **Kesimpulan**

Terdapat tiga kategori konstruksi masyarakat mengenai praktek politik uang terlebih adanya pemberian hijab di dalamnya. Penjelasan tersebut juga berdasarkan dari perbedaan latar belakang organisasi yang dianut oleh masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat menganggap adanya politik uang merupakan suatu tindakan yang tidak benar, dan seharusnya menjadi ranah privasi bagi masing-masing individu, kedua masyarakat menganggap jika adanya praktik politik sah-sah saja adanya karena sudah menjadi tradisi dan ketiga masyarakat tidak peduli ada atau tidaknya politik uang karena tidak memiliki dampak yang signifikan pada kehidupannya. Hijab sendiri menurut informan seharusnya tidak menjadi barang untuk pemancing agar mendapatkan hak suara kaum perempuan, atau dianggap baik. karena praktek politik dalam Islam dianggap haram hukumnya, terlebih hijab dianggap suatu hal yang suci bagi umat islam terutama kaum perempuan.

## Daftar Pustaka

- [1] Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61.
- [2] Gunawan, A. (n.d.). *Praktek Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang)* [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [3] Jayus, D. S., Rachmad, S., & Iwan, S. H. (n.d.). *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif* [PhD Thesis]. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- [4] MASDAR, M. (2020). *PRAKTEK MONEY POLITIK DALAM PEMILU DI DESA WARA, KECAMATAN MALANGKE BARAT, KABUPATEN LUWU UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* [PhD Thesis]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
- [5] Mufarrochah, L. (2020). *Peran perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Mojokerto dalam perspektif Kontruksi Sosial: Ditinjau dengan teori Kontruksi Sosial Peter L Berger* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- [6] Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2).
- [7] Salmaa. (2021, July 1). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya. *Penerbit Deepublish*. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>